RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 60/PUU-XVI/2018
***“Frasa ‘Tidak Berturut-Turut’ Pada Dua Kali Masa Jabatan
Bagi Presiden atau Wakil Presiden”***

I. PEMOHON

Partai PERINDO, yang diwakili oleh:

1. Hary Tanoesoedibjo, sebagai Ketua Umum Partai PERINDO;
2. Ahmad Rofiq, sebagai Sekretaris Jenderal Partai PERINDO.

Kuasa Hukum

Christophorus Taufik, SH., Ricky K. Margono, SH., MH., dkk, advokat pada Kantor DPP Lembaga Bantuan Hukum Partai PERINDO berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Juli 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

4. Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK jo. Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), menyatakan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materil;
5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materil Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
3. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*

- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo* sebagai partai politik berbadan hukum yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008;
 5. Bahwa kepengurusan Partai PERINDO juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO, dengan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq;
 6. Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 telah merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, dengan alasan bahwa frasa “tidak berturut-turut” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 justru bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan telah menambah norma baru dari Pasal 169 huruf n UU 7/2017. Akibatnya Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 justru menjadi ganjalan bagi Pemohon untuk mengusulkan beberapa pasangan yang tengah dipertimbangkan tersebut sehingga jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon;
 7. Bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam 1 (satu) pasangan terkendala dengan adanya frasa “tidak berturut-turut” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017, dikarenakan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009);

8. Bahwa dengan tidak dicalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendampingi Calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, karena dianggap telah 2 (dua) kali menjabat sebagai Wakil Presiden sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017, maka menurut Pemohon belum ada lagi sosok pasangan calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam pengembangan infrastruktur.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 7/2017 yaitu:**

1. **Penjelasan Pasal 169 huruf n:**

“n. Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 6A ayat (1):**

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

2. **Pasal 7:**

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

3. **Pasal 28C ayat (2):**

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

4. **Pasal 28D ayat (1):**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama, dimaksudkan agar kandidat terbaik yang akan mengikuti kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tidak terhalang oleh ketentuan 2 (dua) kali masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden melainkan tetap dapat maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden sekalipun telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut asalkan terdapat jeda antara 2 (dua) periode berturut-turut dengan pencalonan berikutnya. Ketentuan ini senafas dan sejalan dengan jaminan akan “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D UUD 1945;
2. Bahwa kehadiran frasa “tidak berturut-turut” dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU No.7/2017 menjadi tanda tanya mengapa rumusan frasa tersebut justru mengandung tafsiran yang tidak sejalan dan sama sekali bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945, yang mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terpasung oleh Penjelasan pasal yang memberi batas periodisasi/masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut adalah tidak relevan. Seyogyanya instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi terlebih mengamputasi hak seseorang untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden meskipun telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut;
3. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mengajukan dan mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dihalangi oleh kehadiran rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sepanjang frasa “tidak berturut-turut” .;

4. Bahwa menurut Pemohon, kata imbuhan "nya" dalam frasa "dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama" pada Pasal 7 UUD 1945, bermakna berturut-turut. Karena frasa tersebut berkaitan secara langsung dan kumulatif dengan frasa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun". Sehingga yang dimaksud dengan sesudahnya, adalah sesudah tanpa jeda (berturut-turut) menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang telah memegang jabatan selama lima tahun;
5. Bahwa menurut Pemohon, frasa "tidak berturut-turut" dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 bertentangan dan tidak sejalan dengan *original intent* dari Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menyelesaikan masa jabatan pada periode sebelumnya, selama belum dan/atau tidak 2 (dua) kali berturut-turut pada jabatan yang sama;
6. Bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dibatasi untuk jabatan yang sama selama 2 (dua) kali masa jabatan meskipun tidak berturut-turut sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Penjelasan Pasal 169 huruf UU 7/2017 bertentangan dengan *original intent* dari Pasal 7 UUD 1945 serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II angka 186 yang menyatakan:
"Rumusan Penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. *tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;*
 - b. *tidak memperluas, mempersempit atau menambahkan pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.*

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai Presiden dan Wakil Presiden belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan tidak berturut-turut;

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).